

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakatnya (Arif,2008). Orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo,2002)

Otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan.

Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelolaan Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Tentunya hal tersebut dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

PSAP 01 dijelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan

pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan

Peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP no. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baikserta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Namun berkualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi faktor – faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Banyaknya pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakainya dan juga bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. (Andrakusuma, 2014)

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang telah menyangkut posisi keuangan, kinerja serta yang menyangkut posisi keuangan, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP NO 71 Tahun 2010) terdiri dari : (a) Relevan, (b) Andal, (c) Dapat Dibandingkan dan, (d) Dapat Dipahami.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun nya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). (Dadang Swanda, 2015:5).

Kota Bandung yang merupakan salah satu ibu kota Jawa Barat yang memiliki potensi begitu besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Negara Indonesia pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Opini BPK yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kota Bandung.

Tabel 1.1 Opini LKPD Tahun 2012-2016

Pemerintah tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2012	52%	33%	15%	0%	100%	18%	64%	17%	1%	100%	34%	58%	8%	0%	100%
2013	48%	45%	6%	0%	100%	26%	61%	10%	3%	100%	62%	38%	3%	0%	100%
2014	76%	21%	3%	0%	100%	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
2015	85%	15%	0%	0%	100%	55%	37%	7%	1%	100%	66%	33%	1%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	78%	21%	1%	0%	100%

Sumber : IHPS 1 2016 dan IHPS 1 2017 BPK RI

Berdasarkan Tabel di atas terlihat kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada Pemerintah Provinsi, opini WTP bertambah dari 29 LKPD (85%) menjadi 31 LKPD ditahun 2016 (91%). Begitupula untuk Pemerintah Kabupaten yang bertambah dari 224 LKPD (54%) Menjadi 272 LKPD (66%), dan pada Pemerintah Kota dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD (78%).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 pada kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, (7/6/2016). Penyerahan LHP gelombang II itu diberikan kepada 12 kabupaten/Kota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang diperiksa keuangannya. Kota Bandung, yang dipimpin Ridwan Kamil, hanya meraih penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan opini itu BPK mencatat masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas, pembukaan rekening oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa melalui persetujuan kepala daerah atau Bendahar Umum Daerah (BUD), aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Selain itu, tahun ini BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar di sejumlah Pemerintah Daerah untuk Tahun 2015. BPK mengungkap adanya kelebihan bayar mencapai 58,98 miliar. Oleh karena itu Kota Bandung masih banyak yang harus dibenahi terutama dalam masalah pencatatan aset.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintah, hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi menjadikan

kurangnya pemahaman atau penugasan aparatur Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Kertidakpahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi PNS, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dalam jabatan.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan lebih cepat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat terselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Secara cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Bandung dinilai belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah

daerah tahun 2015 yang merupakan tahun pertama penerapan sistem laporan keuangan tersebut. Selain itu juga faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat yaitu minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan, sehingga menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Aldiani (2010) berpendapat bahwa ketersediaan perangkat pendukung akan membantu LKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan informasi yang berkualitas. Perangkat pendukung tersebut tidak lain berupa teknologi informasi (*hardware* dan *software*) yang memadai.

Masalah lainnya berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu seperti pengimplementasian teknologi informasi yang tidak murah, keterbatasan dana untuk

pemutakhiran data dan perawatan kondisi *hardware* dan *software*, menjadi kendala pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah kota Bandung. Oleh karena itu, walaupun pegawai merasakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi informasi, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan teknologi secara maksimal. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang kapabel dan teknologi informasi yang memadai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melinda Ashari (2016) dengan judul pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian terdahulu dilakukan di Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad Purwakarta sedangkan penulis meneliti di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung dan dari penelitian terdahulu juga variable menggunakan kapasitas sumber daya manusia dan variable y menggunakan kualitas laporan keuangan instansi sedangkan penulis menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pemkot Bandung masih mendapatkan opini WDP yang diberikan BPK karena masih banyak aset yang belum tuntas
2. Adanya ketidakpahaman aparatur daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
3. Banyaknya Sumber daya manusia yang belum memiliki latar belakang akuntansi dan auditor.
4. Adanya keterbatasan dana untuk pengimplementasian teknologi informasi yang tidak murah.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya Batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahsan antara lain :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
3. Bagaimana pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
5. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
6. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait yakni sebagai berikut :

1. Penulis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pasundan.

2. Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, informasi dan kelengkapan data yang bermanfaat dalam pengembangan perusahaan. Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Waktu penelitian akan dilakukan pada tahun 2019 hingga penelitian selesai dilakukan.